KOMUNIKASI ORGANISASI PASCA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PERIODE 2013-2018 DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

PRIYANTI KARIA
NIM. D02416378

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2020

KOMUNIKASI ORGANISASI PASCA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PERIODE 2013-2018 DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO

Priyanti Karia[1], Srihandayani Suprapto[2], Sri Lestari Gintulangi[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the process of organizational communication after the election of mayors and deputy mayors for the 2013-2018 period at the Regional Secretariat of Gorontalo City, causing political conflict. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the Post-Mayor and Deputy Mayor Election Organizational Communication for the 2013-2018 Period at the Regional Secretariat of Gorontalo City had taken place as before, but not all of them were optimal. The policies that have been applied and implemented are in accordance with existing regulations. However, emotionally it cannot be denied that there must be officials in the Regional Secretariat who do not like the elected mayor and deputy mayor, but this is only a personal secret.

Keywords: Organizational Communication

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan penelitian ini adalah mengetahui proses Komunikasi Organisasi Pasca Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Periode 2013-2018 Di Sekretariat Daerah Kota Gorontalo sehingga menyebabkan terjadinya konflik politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi Organisasi Pasca Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2013-2018 Di Sekretariat Daerah Kota Gorontalo telah berlangsung seperti sebelumnya namun tidak semuanya optimal. Kebijakan-kebijakan yang telah berlaku dan dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, secara emosional tidak dapat dipungkiri pasti ada perangkat di Sekretariat Daerah yang tidak suka dengan walikota dan wakil walikota yang terpilih akan tetapi hal tersebut hanya menjadi rahasia pribadi masing-masing.

Kata Kunci : Komunikasi Organisasi

PENDAHULUAN

Komunikasi adalah instrumen yang digunakan manusia dalam berinteraksi dengan sesama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berorganisasi. Dalam organisasi komunikasi merupakan alat yang berfungsi sebagai penghubung serta pembangkit motivasi antar setiap anggota sehingga sebuah organisasi dapat berjalan maju. Proses komunikasi yang efektif merupakan syarat terbinanya kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan unsur pokok selain tujuan organisasi dan motivasi.

Memasuki kebebasan berkomunikasi pasca reformasi politik di Indonesia, pembicaraan politik di forum terbuka yang mengkritisi kebijakan pemerintah menjadi hal yang biasa. Padahal, sebelumnya tidak mudah mengungkapkan kritik terhadap pelayanan publik di Indonesia. Terlebih lagi jika kritik dan ketidaksepakatan menyangkut pusat-pusat kekuasaan, yang mengendalikan roda pemerintahan, jelas sebagai tindakan yang sulit ditemukan. Bahkan sebatas bernostalgia terhadap sisi positif masa pemerintahan sebelumnyapun, sulit diungkapkan di ruang-ruang publik, akibat kontrol ketat terhadap arus informasi lateral maupun vertikal dari pemerintahan sebelum reformasi politik. Terjadinya perubahan sistem politik di Indonesia sejak tahun 1998, jelas membawa dampak kompleks dalam kebebasan mencari, menggunakan dan menyampaikan pendapat kepada rakyat. Karena satu sisi, menerima dengan gegap gempita kebebasan berkomunikasi, di pihak lainnya, justru merasa terganggu dan memposisikan demokrasi berkomunikasi merupakan biang keladi dari berbagai masalah yang dihadapi bangsa dan negara.

Tentu saja dapat dimaklumi, mengingat pola komunikasi dalam pemberitaan, penyiaran dan pembicaraan publik, yang diunggulkan adalah demi stabilitas nasional. Sebuah jargon komunikasi politik populer pada massanya, yang menghasilkan komunikasi linier datar dalam bingkai keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Dalam nuansa tanpa gejolak dan keseragaman informasi satu arah tanpa interaksi egaliter, maka ruang-ruang publik diisi oleh komunikasi politik sebagai epigon retorika kekuasaan negara, yang cenderung mengedepankan keberhasilan dibandingkan ketidakmampuan mengemban sejumlah tugas pembangunan untuk seluruh rakyat,

tanpa diferensiasi sosial, ekonomi dan politik.

Karena itu, ketika Indonesia memasuki era kemerdekaan berekspresi sangat beralasan jika selalu muncul pro dan kontra terhadap etika komunikasi atau pembicaraan di ruang publik. Namun yang harus dijunjung tinggi bersama tentang kebebasan berpendapat adalah landasan hukum kebebasan berkomunikasi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28F, menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berpijak kepada ketentuan ini, maka kebebasan berkomunikasi merupakan hak masyarakat. Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenthiel (dalam Haryanto, 2010: 7), “ hak atas informasi merupakan hak dasar yang melekat pada manusia, atau sebagai kesadaran manusia untuk mengetahui hal-hal diluar dirinya”. Dalam penyelenggaraan pemerintah, hak berkomunikasi seringkali dikaitkan dengan komunikasi politik atau penyampaian pesan-pesan kepada khalayak atau rakyat yang didalamnya mengandung kebijakan kekuasaan negara.

Secara umum, komunikasi politik lazim dikaitkan dengan pembicaraan politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun non verbal yang dapat mempengaruhi rakyat maupun pemerintah dalam suatu sistem politik. Atau secara sederhana dapat disebutkan bahwa komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang bermuatan politik dari suatu sumber kepada penerima untuk menciptakan pemahaman makna bersama. Mengingat komunikasi melekat pada setiap orang sebagaimana, menurut Watzlawik (dalam Bower dan Bradac, 1982: 3), “manusia adalah mahluk yang tidak bisa tidak berkomunikasi”, maka setiap tingkah laku manusia, termasuk pada saat diam, dan tidak merespon pesan politik dari suatu sumber, tetap saja menimbulkan makna yang berhubungan dengan nuansa politik.

Dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, Bambang Setiawan (1990: 407) berpendapat, “komunikasi politik adalah proses penyampaian pendapat, sikap dan tingkah laku orang-orang, lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan politik dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan politik, sedangkan yang dimaksud dengan

politik tidak lain adalah kehidupan bernegara". Secara fleksibel, "komunikasi politik merupakan komunikasi yang mengacu pada kegiatan politik" (Nimmo, 2007: 8). Dengan demikian semua kegiatan bernuansa politis, yang dilakukan oleh pemerintah, atau kekuasaan negara beserta institusi pendukung maupun yang dilakukan rakyat pada umumnya, merupakan bentuk komunikasi politik.

Organisasi adalah sektor, di dalamnya terdapat suatu sistem yang berintegritas dan terdapat pula sebuah struktur organisasi. Menurut Wick (dalam Masmuh, 2013:180) "Organisasi adalah suatu sistem yang menyesuaikan dan menopang dirinya dengan mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya". Organisasi dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Agar dapat berjalan dengan lancar, diperlukan komunikasi. Semua kecenderungan organisasi saat ini dibentuk karena ada interaksi diantara anggotanya, dengan kata lain sebuah komunikasi adalah alat bantu oleh anggota dalam organisasi yang membuat organisasi itu ada (Littlejohn dan Foss, 2009:395). Sedangkan menurut oleh Kholiq (2010 : 6) bahwa dalam sebuah organisasi terdapat struktur yang menjabarkan jabatan dan fungsinya, dalam hal ini disebut kepemimpinan dan dua unsur yang harus diperhatikan: Pemimpin dan dipimpin, jika proses komunikasi keduanya berjalan efektif, maka keberlangsungan organisasi dapat berjalan dengan baik".

Dinamika politik lokal dalam perebutan kekuasaan pada rezim Orde Lama dan Orde Baru dipandang kurang begitu menarik, karena jarang terjadi konflik antar elit politik baik di level pemilihan Gubernur, Bupati maupun Walikota. Pasca reformasi berlangsung dinamika politik nasional berubah total dinamika politik daerah berubah. Semua orang dan kelompok masyarakat merasa lega karena terlepas dari sebuah beban berat yang bernama otoritarianisme dibawah rezim pemerintahan Soeharto (Gaffar, 2006). Pasca Orde Baru berkuasa, pola pergantian kepemimpinan di daerah menimbulkan konflik kepentingan yang sulit dihindari. Berbagai masalah yang terjadi mendorong timbulnya konflik dan integrasi karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial (Setiadi & Usman, 2011).

Salah satu bentuk konflik sosial ialah konflik politik. Karena konflik politik adalah bagian dari konflik sosial, konflik politik mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan konflik sosial. Hal yang membuat konflik sosial

berbeda dari konflik politik adalah kata “politik” yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik. Tidak seperti konflik sosial, konflik politik mempunyai konotasi politik yakni mempunyai keterkaitan dengan negara/ pemerintah, para pejabat politik/ pemerintahan, dan kebijakan. Konflik politik merupakan konflik kelompok, sehingga yang dimaksud dengan konflik kelompok adalah konflik yang terjadi antara dua kelompok atau lebih (Rauf, 2001).

Agustino (2009) memandang elit politik sebagai aktor politik yang aktif berpolitik. Dalam pandangan Varma (2010), menegaskan bahwa setidaknya masyarakat terbagi dalam dua kategori yang mencakup: pertama, sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah dan kedua, sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.

Konflik terjadi karena tidak ada konsensus antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok didalam masyarakat. Konsensus akan tercipta bila ada kesepakatan antara mereka yang berkonflik sehingga tidak membuka peluang adanya perbedaan pendapat dalam masalah yang disepakati tersebut. Selain itu, keberhasilan dalam mengelola konflik ditentukan oleh ketepatan dalam memilih teknik pengelolaan, kemampuan pihak ketiga atau pemimpin dalam mengelola konflik, dan kesediaan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik dengan mengunakan metode dominasi, kompromis, dan pemecahan masalah secara integratif merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian konflik (Wahyudi, 2011).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, telah memberikan spirit baru bagi masyarakat karena bisa berpartisipasi secara langsung. Akan tetapi dalam prakteknya Pilkada langsung memang masih banyak mengalami hambatan hingga menimbulkan konflik. Dalam posisi tersebut memang Pemerintah Pusat terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi konflik yang terjadi, namun selalu gagal menemukan titik temu yang seimbang sehingga muncul protes dan persoalanpersoalan politik lokal (Nas, 2007).

Dalam konteks pergantian kekuasaan dari rezim lama kepada rezim baru, ternyata di beberapa daerah menimbulkan persoalan. Tajamnya kepentingan politik antar kekuatan politik maupun intrakekuatan politik, mengakibatkan

sejumlah konflik dalam perebutan jabatan -jabatan politik seperti Gubernur, Bupati dan Walikota seringkali tidak dapat dihindari. Hasil penelitian LIPI (2005), menunjukan bahwa pola pergantian kekuasaan di tingkat lokal yang sering menyebabkan konflik, sebenarnya bukanlah persoalan baru.

Setelah proses percepatan demokrasi secara beruntun tersebut berjalan kurang lebih lima tahun terhitung dari 1 Juni 2005, ternyata masih juga menyisakan banyak persoalan, bahkan agenda pemilihan kepala daerah secara langsung pun juga berkontribusi menambah beban politik, sosial bahkan beban finansial republik ini. Pemilihan kepala daerah secara langsung terlalu boros, dan tidak seimbang dengan cost politik yang telah dikorbankannya. Kenyataan yang tak terhindarkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah muncul kapitalisasi dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Dengan munculnya kapitalisasi ini maka pemilihan kepala daerah secara langsung jauh lebih mahal dibandingkan dengan model pemilihan kepala daerah lewat perwakilan DPRD.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini, nuansa yang paling menonjol adalah maraknya sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sidang sengketa pemilihan kepala daerah telah mendominasi perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian The Habibie Centre (2013), saat di mana Pilkada langsung digelar (2005-2013) telah terjadi konflik dalam Pilkada yang skalanya cukup beragam yang terjadi di 10 provinsi di Indonesia. Data penelitian menunjukan sedikitnya terdapat 585 kasus kekerasan dalam Pemilukada yang mengakibatkan korban tewas 47 orang, cedera 510 orang, bangunan rusak 416 buah.Konflik ini dipicu oleh isu yang berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus lainnya, tetapi secara umum, isu yang muncul adalah terjadi perbedaan penafsiran dari segi hukum atas hasil pemilihan, adanya kelompok pendukung yang tidak menerima hasil pemilihan sehingga menimbulkan protes dan tindakan anarkis, hasil pemilihan dianggap cacat hukum, adanya isu politik uang dan penolakan hasil pemilihan karena calon diduga korupsi.

Perebutan posisi dalam kekuasaan politik yang terjadi antara Marten Taha dan Adhan Dambea secara nyata merupakan perebutan terhadap sumber daya yang tergolong langka dan terbatas. Kedua kelompok ini melihat posisi politik

yang langka tersebut mempunyai daya tarik yang tinggi sehingga menjadi rebutan bagi keduanya. Hal ini karena berbagai sebab, pertama adalah tingginya penghargaan yang melekat pada jabatan politik. Jabatan politik memberikan kepada para penguasa politik kekuasaan yang besar terhadap masyarakat karena bisa membuat keputusan-keputusan penting yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Di samping itu, yang bisa menduduki jabatan tersebut bukanlah sembarang, tetapi orang-orang yang dianggap mempunyai kelebihankelebihan dibandingkan kebanyakan orang. Oleh karena itu keinginan menjadi terkenal dan dihormati oleh rakyat merupakan salah satu alasan utama bagi adanya daya tarik posisi politik.

Kecenderungan Adhan Dambea sebagai penguasa politik berusaha untuk mempertahankan posisi politik yang dimilikinya, maka tak mengherankan ia membela diri. Kelompoknya menyerang dan menyalahkan pihak yang menggugatnya sebagai penguasa politik melalui lembaga pengadilan. Upaya mencekal Adhan Dambea ini dilakukan oleh kelompok marten Taha sebagai elit kelas penguasa yang memiliki kemampuan yang efektif memonopoli pos-pos kunci dalam politik dan pemerintahan.

Hambatan terbesar bagi konsensus dalam penyelesaian sengketa Pilkada Kota Gorontalo adalah sikap masing-masing kelompok elit calon yang tidak mau menerima begitu saja hasil Pilkada yang telah diputuskan oleh KPU Kota Gorontalo. Kelompok elit calon ini tetap berpegang teguh pada pendapat yang dianutnya secara fanatik tanpa membuka kemungkinan bagi terjadinya perubahan terhadap pendapat tersebut. Sehingga untuk merubah pandangan mereka tersebut hanya dapat dicapai melalui lembaga pengadilan yang menanggani sengketa Pilkada. Sikap dan pandangan seperti ini sangat sulit untuk mewujudkan konsensus di antara kelompok yang berkonflik karena masing-masing menganggap pendapatnya yang benar.

Memperhatikan berbagai data dan informasi yang di dapatkan selama obeservasi, ditemukan akar penyebab terjadinya konflik elit dalam Pilkada Kota Gorontalo tahun 2013. menunjukan bahwa adanya konflik elit dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013 disebabkan oleh adanya perseturuan antrara elit partai politik.

Selain penyebab konflik elit yang terjadi di internal Partai, hal tersebut ikut menyebabkan kekisruhan saat Proses dan tahapan

Pilkada Walikota Gorontalo berlangsung tahun 2013. Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013 diikuti oleh empat pasangan calon, tiga pasangan calon diusung oleh Partai Politik yakni Feriyanto Mayulu – Abdurrahman Bachmid (FB) PAN dan PKS, Marten Taha – Budi Doku (MADU) Partai Golkar dan A.W Talib – Ridwan Monoarfa (WAHID) PPP dan PDK, serta satu pasangan calon lainnya melalui jalur perorangan yakni Adhan Dambea – Inrawanto Hasan (DA'I).

Selama proses Pilkada berlangsung terjadi pemecatan terhadap 3 orang Komisioner KPU Kota Gorontalo masing-masing Ketua KPU Rizan Adam, dan Hadi Sutrisno, Djarnawi Datau sebagai anggota. Ketiganya di berhentikan oleh DKPP karena terbukti melanggar Kode Etik dikarenakan telah meloloskan Adhan Dambea-Inrawanto Hasan (DA'I) sebagai calon yang tidak memenuhi syarat. Pasangan DA'I dicoret karena masalah Ijazah SD, di mana Adhan Dambea hanya menggunakan Surat Keterangan Tamat (SKT) saat pendaftaran, sedangkan yang dipersyaratkan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2012, adalah Surat Keterangan Penganti Ijazah (SKPI). Proses tersebut membuat KPU Kota Gorontalo memutuskan mencoret pasangan DA'I pada tanggal 27 Maret 2013, satu hari menjelang pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2013.

Proses tersebut membuat KPU Kota Gorontalo memutuskan mencoret pasangan DA'I pada tanggal 27 Maret 2013, satu hari menjelang pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2013. Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa Pilkada Kota Gorontalo sejak disidangkan pada 30 April 2013 hanya menghasilkan Putusan Sela, kemudian dilanjutkan pada tanggal 24 April 2014 diputuskan, dan memenangkan pasangan Marten Taha – Budi Doku (MADU) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo periode 2013- 2018. Hal ini tentu menyebabkan ketidakstabilan politik daerah. Konflik elit politik ini telah ada sebelum Pilkada dilaksanakan yang kemudian ikut memengaruhi proses tahapan Pilkada. Konflik ini berlangsung selama 17 bulan, yakni sejak dimulainya tahapan pencalonan sampai dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, konflik Pilkada ini juga telah mengakibatkan Kota Gorontalo selama kurun waktu 14 bulan, tidak memiliki Walikota dan Wakil Walikota definitif untuk menjalankan roda pemerintahan.

Penelitian terkait dengan proses komunikasi organisasi pasca pilkada sebenarnya telah banyak yang melakukan penelitian dan mengkaji penerapannya di Indonesia. Pada penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan. Penelitian dari Akhid Ista'in Mubarok (2016) tentang Komunikasi Organisasi Pada Dinas Perijinan Kota Yogyakarta Untuk Meningkatkan Pelayanan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat komunikasi antar pegawai di dinas belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat pada pelayanan yang kurang maksimal akibat tidak adanya pelaksanaan tupoksi secara terorganisir. Selanjutnya, penelitian tentang Pelaksanaan Komunikasi Organisasi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten oleh Krisna Mulawarman, Yeni Rosilawti (2008), dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi organisasi di dinas pendidikan kabupaten klaten telah berjalan dengan baik meskipun begitu komunikasi yang baik lebih ditingkatkan lagi.

Sesuai dengan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses Komunikasi Organisasi Pasca Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Periode 2013-2018 Di Sekertariat Daerah Kota Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan atau dimaksudkan untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan menggambarkan suatu fenomena tertentu (Singarimbun dan Effendy, l992; Arikunto, 2000). Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Arikunto (2000), bahwa penelitian deskriptif biasanya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini diajukan untuk mengetahui bagaimana proses Komunikasi Organisasi Paska Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Periode 2013/2018 di Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian/ pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara

langsung dengan informan dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui data hasil yang berhubungan dengan hasil observasi yang meliputi data-data yang mendukung data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah menurut Pace dan Faules (2015:184-205) yang terdiri dari beberapa indikator yaitu Komunikasi ke Bawah, Komunikasi ke Atas, Komunikasi Horizontal, Komunikasi Lintas Saluran dan Komunikasi informal, pribadi atau selentingan.

Berikut penjelasan dari beberapa indikator tersebut :

1. Komunikasi Ke Bawah

Berkomunikasi merupakan suatu kebutuhan hidup manusia. Dengan berkomunikasi manusia akan dapat berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga kehidupan manusia akan bermakna. Disisi lain ada sejumlah kebutuhan dalam diri manusia itu hanya dapat dipenuhi melalau komunikasi dengan sesama. Makin banyak manusia itu melakukan aktivitas komunikasi antara satu dengan yang lainnya, akan semakin banyak informasi yang didapatnya dan semakin besar peluang keberhasilan seseorang itu dalam kehidupannya.

Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah.

Berdasarkan hasil analisi peneliti berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi ke bawah yang terjalin di Sekertariat Daerah Kota Gorontalo pasca konflik pilkada tersebut tetap berjalan seperti seharusnya. Hal ini terlihat dari aktifitas perangkat yang ada di sekertariat daerah yang tetap rutin bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Namun, terlepas dari hal tersebut apabila ada kebijakan-kebijakan yang akan dirumuskan maka perlu kajian teknis bersama dalam mengeluarkannya, dan juga pasti ada pergeseran posisi jabatan atau rotasi jabatan dalam rangka penempatan sumberdaya perangkat sesuai bidang keahlian demi memaksimalkan tuposi masing-masing. Namun terlepas dari hal tersebut, secara emosional pasti ada yang tidak menyukai walikota dan wakil walikota terpilih akan tetapi hal tersebut hanya menjadi rahasi pribadi masing-masing perangkat di Sekertariat Daerah. Namun, secara keseluruhan mereka tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Komunikasi Ke Atas

Ahli komunikasi mengatakan bahwa "*communication is the process of sending and reciving symbols with attach meaning*". Artinya bahwa komunikasi sebagian kegiatan penyampaian informasi dan pengertian dengan menggunakan tanda-tanda yang sama. *Communication is the evoking of a shered or common meaning in another person*. (Nelson & Quick, 2006 : 250). Komunikasi adalah untuk membangkitkan pengertian bersama kepada orang lain. Demikian juga Jennifer M. George (2006 : 437) mendefinisikan bahwa komunikasi adalah membagi informasi antara dua orang atau lebih atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama, *(Comunication the shering of information between two or more individuals or group to reach a common understanding)*.

Komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ketingkat yang lebih tinggi (penyelia).

Berdasarkan hasil analisa peneliti bahwa Komunikasi ke atas di sekertariat daerah kota gorontalo pasca konflik yang terjadi pada pemilihan walikota dan wakil walikota periode 2013/2018, berjalan dengan semestinya. Semua pegawai di sekertariat daerah bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Perihal kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh walikota tentunya telah melalui kajian teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan secara umum baik regualsi maupun kebijakan itu sifatnya memang mengikat bagi para pegawai yang bersangkutan. Oleh sebab itu tinggal dibutuhkan kesadaran bagi para pegawai di Sekertariat Daerah Kota Gorontalo untuk menjalnkan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya.

3. Komunikasi Horizontal

Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi individu individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama.

Berdasarkan hasil analisi peneliti terkait indikator tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi horizontal belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan yang secara keseluruhan belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa perangkat sekertariat Daerah yang belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut, sehingga mengakibatkan komunikasi kurang berjalan dengan baik. Dalam menjalankan kebijakan memerlukan kesadaran dari masing-masing perangkat daerah bahwa ada

peran didalamnya untuk memaksimalkan kebijakan tersebut. Sementara ituu, seluruh kebijakan yang dibuat tentunya telah dikaji secara teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara pribadi, ada orang-orang tertentu yang tidak begitu menyukai kebijakan yang diberlakukan walaupun itu telah sesuai ketentuan yang ada. Salah satu penyebabnya adalah kemungkinan figure yang terpilih bukan pilihannya. Namun selalu ditekankan apabila ada salah satu pegawai ASN di Sekertariat Daerah kedapatan berpihak pada salah satu calon walikota atau ikut dalam politik pasti aka nada sanksi yangdiberkan bahkan berujung pada pemecatan.

4. Komunikasi Lintas Saluran

Komunikasi merupakan unsur pengikat berbagai bagian yang saling bergantung dalam sistem itu. Tanpa komunikasi tidak akan ada kegiatan yang terorganisir.

Komunikasi lintas saluran merupakan merupakan salah satu bentuk komunikasi organisasi dimana informasi diberikan melewati batas-batas fungsional atau batas-batas unit kerja, dan diantara orang-orang yang satu sama lainnya tidak saling menjadi bawahan atau atasan. Baik komunikasi horizontal maupun komunikasi lintas saluran mencakup hubungan lateral yang penting bagi komunikasi organisasi yang efektif.

Berdasarkan hasil analisa peneliti bahwa komunikasi lintas saluran khusunya terkait dengan pelaksanaan kebijakan telah dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan. Selain itu, dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak mengakibatkan persoalan yang berkepanjangan, namun perlu ditekankan bagi perangkat sekertariat untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan penuh tanggungjawab. Dan perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan harus professional karena ada regulasi yang menuntut akan hal tersebut. Apabila ada yang melanggar dari regulasi tersebut maka aka nada sanksi yang dikenakan.

5. Komunikasi informal, pribadi atau selentingan

Dalam komunikasi organisasi kita mempelajari ciptaan dan pertukaran pesan dalam seluruh organisasi. Pesan dalam organisasi ini dapat dilihat menurut beberapa klasifikasi, yang berhubungan dengan bahasa, penerima yang dimaksud, metode difusi dan arus tujuan dari pesan.

Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan

bagian dari suatu organisasi tertentu. Komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi. Struktur organisasi cenderung mempengaruhi komunikasi, dengan demikian komunikasi dari bawahan kepada pimpinan sangat berbeda dengan komunikasi antar sesamanya.

Selentingan digambarkan sebagai metode penyampaian laporan rahasia dari orang ke orang yang tidak bisa diperoleh dari jalur biasa. Komunikasi informal cenderung mengandung laporan rahasia tentang orang orang dan peristiwa yang tidak mengalir melalui saluran perusahaan yang formal. Informasi yang diperoleh melalui seletingan lebih memperhatikan “apa yang dikatakan atau didengar oleh seseorang” dari pada apa yang dipegang oleh pemegang kekuasaan. Paling tidak sumbernya terlihat “rahasia” meskipun informasi itu sendiri tidak terlihat rahasia.

Berdasarkan hasil analisa peneliti bahwa komunikasi yang terjalin di Sekertariat Daerah Kota Gorontalo yang berhubungan dengan informasi yang sifatnya rahasia, dilakukan berjenjang berdasarkan tingkatan birokrasi dan sesuai dengan etika birokrasi. Hal ini dilakukan agar tidak akan ada kecemburuan sosial di kalangan staf Sekertariat Daerah. Selain itu adanya keterbukaan informasi disetiap pelaksanaan kebijakan sehingga perangkat sekertariat daerah merasa nyaman dalam bekerja tanpa ada hal-hal yang ditutupi oleh siapapun.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa pasca konflik yang terjadi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Gorontalo periode 2013-2018 ikut mempengaruhi jalannya roda kepemerintahan di Kota Gorontalo itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan dari sisi komunikasi organisasi yang terjalin di Sekretariat Daerah pasca pilkada tersebut kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan harus dilaksanakan belum semua dijalankan oleh perangkat di Sekertaris Daerah, karena memang tidak bisa dipungkiri Secara emosional ada sekelompok perangkat di Sekretariat Daerah yang tidak suka dengan walikota dan wakil walikota yang terpilih akan tetapi hal tersebut hanya menjadi rahasia pribadi masing-masing dan ikut berpengaruh dalam proses pemerintahan. Namun secara keseluruhan, baik pihak pimpinan

sampai dengan staf di lingkungan Sekertariat Daerah berusaha memperbaiki keadaan tersebut dengan saling bekerja sama dalam menjalankan segala kebijakan untuk perkembangan daerah kedepannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan agar komunikasi organisasi di Sekertariat Daerah Kota Gororntalo dapat berjalan semakin optimal adalah sebagai berikut :

1. Semua elit politik lokal dapat lebih mengedepankan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat maupun kepada pengikut dan pendukungnya agar konflik seperti ini tidak terjadi lagi dikalangan penguasa politik serta tidak ikut mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Sekertariat Daerah Kota Gorontalo kedepannya.
2. Dalam melaksanakan setiap kebijakan harus profesional dan bertanggung jawab
3. Perlu kesadaran bagi ASN dilingkungan Sekertariat Daerah Kota Gorontalo untuk tidak ikut campur dalam urusan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2009). Pilkada dan Dinamika Politik Lokal . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Almond, Gabriel A. & Sidney Verba (1990). Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara.

Bower, J. W. & James J. B. (1982). Issues in communication theory: a metatheoritical analysis, communication yearbook 5. Sage Publication.

Gaffar, A. (2006). Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haryanto, I. (2010). Media di bawah dominasi modal: ancaman terhadap hak atas informasi" dalam azasi. Edisi Maret-April 2010.

LIPI. (2005). Konflik Antar Elit Politik, Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Littlejohn, Stephen W dan Foss Karen A. 2009, Teori Komunikasi, Theories of Humas Communication, Jakarta: Salemba Humanika.

Masmuh, Abdullah. 2010, Komunikasi dan Organisasi

dalam Prespektif Teori dan Praktek, Malang: UMM Press.

Nas, J. (2007). Konflik Elit Di Sulawesi Selatan, Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal. Makassar: Lephas.

Nimmo, D. (2007). Political communication and public opinion in America,atau komunikasi politik: komunikator, pesan dan media, Cetakan kedua, terjemahan Tjun Surjaman, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Pace Wayne & Faules Don. 2005. Komunikasi Organisasi. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Setiadi, E.M., Usman, K. (2011). Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana.

The Habibie Center. (2013). Kekerasan dalam Pemilukada: Kajian Perdamaian dan Kebijakan. Jakarta: The Habibie Center.

Varma S.P. (2010). Teori Politik Modern. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wahyudi. (2011). Manajemen Konflik Dalam Organisasi. Bandung: CV. Alvabeta.